Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies
Vol 4 No 1 (2025) 21 – 30 E-ISSN 2962-231X
DOI: 10.56672/alwasathiyah.v4i1.472

Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Filsafat Pendidikan di Indonesia

Sirajuddin[1], Masduki Ahmad[2], Suryadi[3]
[1,2,3]Universitas Negeri Jakarta
sirajjuddin10@gmail.com[1], masduki@unj.ac.id[2], suryadi@unj.ac.id[3]

ABSTRACT

This study aims to describe the evaluation of the implementation of Education policy in the perspective of the philosophy of Education in Indonesia. This study uses a literature study method by observing various documents from books and journals. The literature study in this study focuses on researching literature related to Education policy in Indonesia, the philosophy of Education, and the evaluation of education policy. Data collection was carried out by collecting library data, reading, recording, and managing research results objectively, systematically, analytically, and critically by looking at the year of publication and the most recent research. The results of this study indicate that the implementation of Indonesian Education policy has the potential to improve the quality of education, but also faces various challenges. Disparities in education and teacher quality are key factors that need to be considered in policy evaluation. Therefore, it is important to conduct continuous evaluation of education policy to ensure that education goals can be achieved effectively. The government needs to evaluate policy implementation so that education goals can be achieved.

Keywords : Education Policy, Education Philosophy, Education Evaluation.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi implementasi kebijakan Pendidikan dalam perspektif filsafat Pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengamati berbagai macam dokumen baik dari buku maupun jurnal. Studi literatur pada penelitian ini fokus meneliti mengenai literatur yang berkaitan dengan kebijakan Pendidikan di Indonesia, filsafat Pendidikan, dan evaluasi kebijakan pendidikan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengelola hasil penelitian secara objektif, sistematis, analitis, dan krtitis dengan melihat tahun terbit dan penelitian paling mutakhir. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan Pendidikan Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan. Disparitas pendidikan dan kualitas guru menjadi faktor kunci yang perlu diperhatikan dalam evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan pendidikan untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. Pemerintah perlu mengevaluasi implementasi kebijakan sehingga tujuan Pendidikan dapat tercapai.

Keywords : Kebijakan Pendidikan, Filsafat Pendidikan, Evaluasi Pendidikan.

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia. Pendidikan merupakan kunci untuk membangun sebuah peradaban (Falah et al., 2023). Sebagai fondasi bagi kemajuan bangsa, pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter dan keterampilan individu yang dibutuhkan dalam masyarakat yang semakin kompleks. Menurut (World Bank, 2022), pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan

Vol 4 No 1 (2025) 21 – 30 E-ISSN 2962-231X
DOI: 10.56672/alwasathiyah.v4i1.472

produktivitas dan inovasi, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan yang efektif menjadi sangat krusial.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam kebijakan pendidikan, salah satunya adalah kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada sekolah dan siswa dalam menentukan cara belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, meskipun kebijakan ini menjanjikan, banyak pihak yang mempertanyakan efektivitas dan implementasinya di lapangan. Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memahami dampak dari kebijakan ini dalam konteks filsafat pendidikan yang mendasarinya.

Filsafat pendidikan, sebagai suatu disiplin yang mempelajari tujuan, nilai, dan praktik pendidikan, memberikan kerangka acuan yang penting dalam mengevaluasi kebijakan pendidikan. Dengan memahami perspektif filsafat pendidikan, kita dapat mengidentifikasi apakah kebijakan yang diterapkan sejalan dengan nilai-nilai yang ingin ditanamkan dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia, khususnya kebijakan Merdeka Belajar, dalam perspektif filsafat pendidikan.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia, khususnya kebijakan Merdeka Belajar. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji kebijakan pendidikan dari perspektif filsafat pendidikan yang ada, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih baik di masa depan.

Dalam menganalisis implementasi kebijakan, penting untuk memahami konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi pendidikan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana filosofi pendidikan yang berbeda dapat mempengaruhi cara kebijakan pendidikan dirumuskan dan diimplementasikan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memberikan gambaran tentang kebijakan yang ada, tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan tersebut dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik.

Penelitian ini mencakup beberapa pertanyaan kunci yang akan menjadi fokus analisis. *Pertama*, implementasi kebijakan Pendidikan di Indonesia? Pertanyaan ini akan mengarahkan penelitian untuk mengeksplorasi kebijakan tersebut diterapkan di lapangan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap siswa, guru, dan masyarakat. *Kedua*, tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Pendidikan. Dalam konteks ini, penelitian akan berusaha mengidentifikasi berbagai hambatan yang mungkin muncul, baik dari sisi sumber daya manusia, infrastruktur, maupun kebijakan itu sendiri. Tantangan ini penting untuk dipahami agar solusi yang tepat dapat dirumuskan. *Ketiga*, perspektif filsafat pendidikan dapat membantu dalam evaluasi kebijakan Pendidikan. Dengan menjawab pertanyaan ini, penelitian akan menyoroti pentingnya pemikiran filosofis dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan pendidikan, serta bagaimana nilai-nilai pendidikan dapat diintegrasikan ke dalam praktik pendidikan sehari-hari.

Vol 4 No 1 (2025) 21 – 30 E-ISSN 2962-231X
DOI: 10.56672/alwasathiyah.v4i1.472

TINJAUAN LITERATUR

Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Kebijakan Pendidikan merupakan salah satu langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Menurut (Kristina et al., 2024), kebijakan memberikan kebebasan kepada sekolah untuk merancang kurikulum yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan siswa. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif dan relevan bagi siswa. Namun, untuk memahami dampak dari kebijakan ini, perlu dilakukan analisis terhadap kebijakan pendidikan sebelumnya dan bagaimana perubahan ini mempengaruhi sistem pendidikan secara keseluruhan.

Kebijakan Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk disoroti. Kesejahteraan pendidik, pengembangan karir, dan distribus tenaga pendidik yang merata merupakan kunci dalam meningkatkan Pendidikan. Salah satu hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung kualitas Pendidikan adalah dengan terus membangun Pendidikan supaya sesuai dengan zaman melalui kebijakan yang dibuat (Elvarisna et al., 2024). Hal ini tentu saja berdampak pada relevansi program pembelajaran yang dibuat dengan kondisi dan realita yang ada.

Sebelum kebijakan Merdeka Belajar, Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan pendidikan yang sering kali bersifat sentralistik. Misalnya, Kurikulum 2013 yang mengedepankan pendekatan tematik dan integratif. Meskipun memiliki tujuan yang baik, implementasi kurikulum ini sering kali terhambat oleh kurangnya pelatihan bagi guru dan ketidakmerataan infrastruktur pendidikan di berbagai daerah (Fajri, A, 2022). Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan Merdeka Belajar perlu mempertimbangkan pelajaran yang dapat diambil dari kebijakan sebelumnya.

Dampak dari kebijakan pendidikan yang diterapkan di Indonesia juga dapat dilihat dari statistik yang menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka partisipasi kasar (APK) untuk pendidikan menengah pada tahun 2022 mencapai 85%, menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, disparitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan masih menjadi masalah yang perlu ditangani (Hendrawan et al., 2023). Salah satu kebijakan Pendidikan yang ada di Indonesia adalah adanya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adanya program PPPK ini memiliki dampak positif salah satunya dengan adanya pemerataan guru di wilayah Indonesia. Hal ini sebetulnya memberikan fleksibilitas terhadap dalam penempatan guru di sekolah-sekolah (Anggreni et al., 2024).

Selain itu, bentuk kebijakan pemerintah lainnya adalah dengan mengadakan beasiswa berupa Program Indonesia Pintar (PIP) bagi warga yang tidak mampu sehingga mampu menyelesaikan Pendidikan di sekolah menengah. Kemudian adanya Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diberikan pemerintah kepada rakyat yang kurang mampu juga berdampak untuk membangun sumberdaya manusia yang berkualitas (Setyawan, 2018). Kebijakan lainnya juga berupa pengembangan dan pelatihan yang harus diikuti oleh tenaga pedidik dan kependidikan sehingga mereka dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik juga perlu dibuat guna mendorong SDM yang berkualitas (Handayani & Purwanti, n.d.).

Vol 4 No 1 (2025) 21 – 30 E-ISSN 2962-231X
DOI: 10.56672/alwasathiyah.v4i1.472

Filsafat Pendidikan

Filsafat pendidikan merupakan kajian yang mendalam tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari praktik pendidikan. (Tia Basana Hutagalung & Liesna Andriany, 2024) menyatakan bahwa pendidikan seharusnya berorientasi pada pengembangan karakter dan potensi individu, bukan hanya pada pencapaian akademis semata. Dalam konteks ini, filsafat pendidikan dapat memberikan panduan yang jelas tentang tujuan pendidikan dan bagaimana kebijakan seharusnya dirumuskan. (Freire, P, 2021) menekankan pentingnya pendidikan yang bersifat kritis dan dialogis, di mana siswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam proses belajar. Prinsip-prinsip ini sangat relevan dalam konteks kebijakan Merdeka Belajar, yang mendorong keterlibatan siswa dalam menentukan cara belajar mereka. Dengan mengadopsi pendekatan filsafat pendidikan yang inklusif, kebijakan pendidikan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat.

Hubungan antara filsafat pendidikan dan kebijakan pendidikan sangat erat. Kebijakan yang baik harus mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diyakini oleh masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan Merdeka Belajar mencerminkan nilai-nilai tersebut, serta bagaimana implementasinya di lapangan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswa. Indonesia sebagai negara yang menganut Pancasila perlu merumuskan dengan cermat bagaimana orientasi pembelajarannya. Misalnya jika Pendidikan di Amerika yang kental dengan liberalisme pemikiran, kebebasan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, serta kebebasan berpendapat, maka di Indonesia pendidikannya lebih condong mengajarkan tentang nilai budaya, social, dan agama (Rosa et al., 2024).

Dalam Pendidikan, ada yang dikenal dengan tiga pilar Pendidikan. Tiga Pilar Pendidikan tersebut adalah sekolah, siswa, dan orangtua. Ketiga pilar ini harus bersatu padu dan memiliki satu pemahaman dalam memberikan Pendidikan yang baik (Suryana, 2023). Filsafat Pendidikan Indonesia mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan pada (1) Pendidikan yang menitikberatkan pada pengembangan kemandirian peserta didik sehingga mereka mampu mengandalkan kekuatan mereka sendiri; (2) Pendidikan yang memberikan pada kebebasan lahir dan batin kepada individu; (3) Pendidikan yang menitikberatkan partisipasi aktif subjek yang menyadari pentingnya penerapan pengetahuan teoritis dan praktis dalam kehidupan social guna membangun Masyarakat yang beradab (Tia Basana Hutagalung & Liesna Andriany, 2024).

Sebagai negara yang menganut nilai-nilai Pancasila maka seharusnya menjadi pegangan bagi sekolah untuk menyelaraskan visi misinya dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa misalnya harus menjadi patokan bagi seluruh Lembaga Pendidikan baik yang dimasukan ke dalam hidden kurikulum maupun yang bukan (Indriani & Satrianawati, 2018). Nilai nilai ini juga harus dapat memberikan petunjuk bagi Lembaga Pendidikan agar tidak terlena dengan kemajuan teknologi dan informasi sehingga kemajuan teknologi dan informasi hanya dijadikan sebagai alat untuk memajukan Pendidikan yang ada (Nama & Tanggur, 2022).

Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam Pendidikan Karakter (Widiatmoko et al., 2024). Pada implementasi yang lebih detailnya

Vol 4 No 1 (2025) 21 – 30 E-ISSN 2962-231X
DOI: 10.56672/alwasathiyah.v4i1.472

Lembaga Pendidikan dapat merumuskan karakter seperti apa yang diinginkan oleh Lembaga tersebut sehingga para peserta didiknya dapat terbentuk sesuai dengan visi dan misi Lembaga Pendidikan tersebut. (Zaman et al., 2024). Lembaga Pendidikan juga perlu melakukan penguatan-penguatan nilai-nilai baik yang dilakukan melalui program maupun melalui kegiatan sehari-hari sehingga budaya yang diinginkan dapat tercipta dengan baik sesuai dengan yang diinginkan.

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan pendidikan merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan efektif dan memberikan dampak positif. (Wardani et al., 2023) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk analisis dokumen, survei, dan wawancara. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, evaluasi ini menjadi semakin penting mengingat kompleksitas sistem pendidikan yang ada. (Sukmadinata, N. S., 2017) menekankan bahwa evaluasi yang baik harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk konteks sosial, budaya, dan ekonomi.

Dalam hal ini, evaluasi kebijakan Merdeka Belajar perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan, termasuk tantangan yang dihadapi oleh guru dan siswa. Pentingnya evaluasi dalam konteks pendidikan di Indonesia juga didukung oleh (Hendrawan et al., 2023), yang menunjukkan bahwa evaluasi yang berkelanjutan dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik di masa depan. Melalui evaluasi yang komprehensif, kita dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari kebijakan yang ada, serta merumuskan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengukur efektivitas, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia secara keseluruhan.

Evaluasi kebijakan juga berpatokan pada indicator yang sudah dibuat (Windawati & Setyowati, 2015). Kebijakan yang akan dievaluasi juga dapat meminta masukan-masukan terutama kepada kepala sekolah sebagai pemimpin Lembaga Pendidikan. Kemudian, masukan ini akan dianalisis dan diproses serta akan diklasifikasikan untuk mengetahui penyebab dan jenis masalah yang ada. Dari hasil ini, maka diharapkan dapat mendapatkan Solusi yang baik bagi pemerintah selaku pemangku kebijakan Pendidikan (Sundoyo & Sumaryanto, 2012).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi literatur. Penelitian keputsakaan atau studi literatur adalah upaya sistematik dalam mengakses, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai macam materi yang tersedia di perpustakaan yang meliputi referensi buku, penelitian terdahulu, artikel catatan, dan jurnal untuk mendukung dan menjawab permasalahan penelitian (Prastiwi & Widodo, 2023). Studi literatur pada penelitian ini fokus meneliti mengenai literatur yang berkaitan dengan kebijakan Pendidikan, filsafat Pendidikan, dan evaluasi kebijakan.

Metode kegiatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengelola hasil penelitian secara objektif, sistematis, analitis, dan krtitis

Vol 4 No 1 (2025) 21 – 30 E-ISSN 2962-231X
DOI: 10.56672/alwasathiyah.v4i1.472

mengenai kebijakan Pendidikan, filsafat Pendidikan, dan evaluasi kebijakan (Putri et al., 2020). Studi literatur pada penelitian ini sejatinya dilakukan sama dengan pendekatan penelitian lainnya akan tetapi, pengambilan datanya mengambil dari sumber pustaka, membaca, menganalisis dan mencatat hasilnya. Tujuan dari metode ini adalah untuk menjawab Teknik analisa data menggunakan *content analysist* atau analisis isi. Analisis isi digunakan untuk meneliti literatur yang paling relevan, relevan, dan cukup relevan. Kemudian, dilakukan studi dengan melihat tahun terbit dari mulai yang paling mutakhir, mutakhir, sampai tidak mutakhir tetapi memiliki substansi yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian peneliti membaca abstrak yang kemudian akan diteliti dan dicatat secara detail oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pendidikan

Implementasi kebijakan Pendidikan di sekolah menunjukkan variasi yang signifikan di berbagai daerah, salah satunya adalah kebijakan Merdeka belajar. Menurut Kristina et al., (2024), beberapa sekolah berhasil mengadopsi prinsip-prinsip Merdeka Belajar dengan baik, menciptakan lingkungan belajar yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Namun, ada juga sekolah yang mengalami kesulitan dalam menerapkan kebijakan ini, terutama yang berada di daerah terpencil dengan keterbatasan sumber daya. Dampak positif dari implementasi kebijakan ini termasuk peningkatan keterlibatan siswa dalam proses belajar dan pengembangan kreativitas. Namun, ada juga dampak negatif yang muncul, seperti kebingungan di kalangan guru mengenai bagaimana menerapkan kebijakan ini secara efektif. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan dan dukungan yang lebih baik bagi guru untuk memahami dan mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar dengan baik. Kondisi ini diperkuat oleh data yang menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan partisipasi siswa, kualitas pendidikan masih menjadi tantangan. Menurut laporan dari BPS, meskipun APK pendidikan menengah meningkat, hasil ujian nasional menunjukkan adanya disparitas yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan masih perlu ditingkatkan (Hendrawan et al., 2023).

Kemudian, sebagai salah satu Langkah dalam menangani pemerataan Pendidikan, Pemerintah membuat dua kebijakan yaitu Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) (Setyawan, 2018). Program PIP ini menyasar peserta didik supaya mereka dapat melanjutkan Pendidikan pada jenjang Pendidikan menengah sedangkan program KIP menyasar Masyarakat kurang mampu yang membantu mereka untuk menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi. Upaya pemerintah ini tentu harus diapresiasi sebab melalui program ini diharapkan membantu pemerataan Pendidikan di Indonesia. Program pemerataan dan kesejahteraan mereka juga perlu diperhatikan. Salah satu Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemerataan pendidik dan membangun kesejahteraan mereka adalah melalui program PPPK (Anggreni et al., 2024). Kebijakan Pemerintah ini membantu mengatasi pemerataan pendidik di setiap daerah dan juga meningkatkan kesejahteraan pendidik.

Vol 4 No 1 (2025) 21 – 30 E-ISSN 2962-231X
DOI: 10.56672/alwasathiyah.v4i1.472

Tantangan dalam Implementasi

Salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar adalah disparitas pendidikan di Indonesia. Hamid, A. (2020) mencatat bahwa perbedaan akses dan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan masih sangat mencolok. Sekolah-sekolah di daerah terpencil sering kali mengalami kesulitan dalam menyediakan fasilitas dan sumber daya yang memadai, sehingga sulit untuk menerapkan kebijakan yang memerlukan dukungan infrastruktur yang baik. Kualitas guru juga menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pendidikan. (Wardani et al., 2023) menunjukkan bahwa banyak guru di daerah terpencil tidak mendapatkan pelatihan yang cukup untuk mengimplementasikan kurikulum baru. Hal ini menyebabkan ketidakpahaman tentang prinsip-prinsip Merdeka Belajar dan menghambat inovasi dalam pembelajaran. Selain itu, (Yoshida et al., 2014) menekankan bahwa perubahan kurikulum yang cepat tanpa dukungan yang memadai dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpuasan di kalangan guru.

Selain itu, adanya potensi salah sasaran bagi penerima beasiswa juga masih senantiasa terjadi. Masyarakat yang seharusnya lebih layak menerima beasiswa kadang secara praktiknya malah tidak mendapatkan beasiswa. Hal ini bisa terjadi karena (1) instansi tidak memiliki data yang akurat; (2) instansi memiliki kedekatan baik secara emosional maupun relational sehingga lebih mengutamakan mereka. Hal ini tentu saja akan menyebabkan masalah salah satunya berupa kecemburuan social di masyarakat. Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi pemerintah untuk diselesaikan sehingga menghasilkan apa yang dicita-citakan.

Perspektif Filsafat Pendidikan

Filsafat pendidikan dapat memberikan panduan yang berharga dalam evaluasi kebijakan pendidikan. (Gutek, G. L., 2020) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip filsafat pendidikan dapat membantu dalam merumuskan tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai dalam pendidikan. Dalam konteks kebijakan Merdeka Belajar, penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Sebagai contoh, penerapan prinsip-prinsip pendidikan progresif yang menekankan pada pengalaman belajar yang aktif dan kolaboratif dapat membantu menciptakan suasana belajar yang lebih menarik bagi siswa. Dengan memahami bagaimana filsafat pendidikan dapat diterapkan dalam kebijakan, kita dapat mengevaluasi sejauh mana kebijakan Merdeka Belajar mencerminkan nilai-nilai yang diinginkan dalam pendidikan.

Setiap negara memiliki ideologinya tersendiri. Indonesia memiliki Pancasila sehingga Pendidikan yang diselenggarakan harus selaras dengan Pancasila. Salah satu contoh Pendidikan yang harus selaras dengan Pancasila adalah dengan mewajibkan mata Pelajaran agama, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Pancasila memberikan ruang yang sangat luas bagi para pemeluk agama untuk menyelenggarakan Pendidikan berdasarkan ajaran agama tertentu. Hal ini disebabkan salah satu penyebab terbentuknya Pancasila adalah karena agama oleh karena itu, agama dan Pancasila tidak berbenturan.

Filsafat Pendidikan setidaknya memberikan perspektif bagaimana Pendidikan ini dikelola dengan baik dan menghasilkan manusia yang bermutu sesuai dengan cita-cita yang

Vol 4 No 1 (2025) 21 – 30 E-ISSN 2962-231X
DOI: 10.56672/alwasathiyah.v4i1.472

dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Filsafat Pendidikan memberikan ruang untuk membentuk pola pikir, rasa, dan karakter peserta didik sesuai yang dikehendaki. Filsafat Pendidikan juga memberikan ruang untuk menggali sumber nilai baik dari nilai agama, budaya, *common sense* atau perpaduan dari tiga komponen tersebut. Hal ini semata-mata dibentuk sehingga memberikan bagaimana Pendidikan berjalan sebagaimana seharusnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pendidikan Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan. Disparitas pendidikan dan kualitas guru menjadi faktor kunci yang perlu diperhatikan dalam evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan pendidikan untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pengambil kebijakan memperhatikan peningkatan kualitas guru dan infrastruktur pendidikan. Pelatihan yang lebih baik bagi guru dan dukungan yang memadai untuk sekolah-sekolah di daerah terpencil sangat penting untuk memastikan implementasi kebijakan yang sukses. Selain itu, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswa. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pendidikan di Indonesia dengan menyoroti pentingnya evaluasi berkelanjutan dan penerapan prinsip-prinsip filsafat pendidikan dalam kebijakan. Rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut di bidang pendidikan juga diperlukan untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang bagaimana kebijakan pendidikan dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Anggreni, L., Setyowati, S. E., & Nurkolis, N. (2024). DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PPPK GURU DI KECAMATAN WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG. *LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, *4*(4), 1060–1066. https://doi.org/10.51878/learning.v4i4.3482

Elvarisna, E., Sari, R., Zahara, S., Marsena, M., & Rahmi, S. (2024). ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN. *Dharmas Education Journal (DE_Journal)*, *5*(2), 1174–1182. https://doi.org/10.56667/dejournal.v5i2.1623

Fajri, A. (2022). *Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Evaluasi dan Tantangan*. PT Pustaka Nasional.

Falah, S., Maulana, I., & Izzah, N. (2023). Optimizing Academic Achievement of Students through Effective Leadership of Principal. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *7*(3), 806–819. https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v7i3.5210

Freire, P. (2021). *Pedagogy of the Oppressed*. Continuum.

Gutek, G. L. (2020). *Philosophical and Ideological Perspectives on Education*. Pearson.

Hamid, A. (2020). Inequality in Education: The Case of Indonesia. *International Journal of Educational Development*, *11*(28).

Handayani, S., & Purwanti, D. (n.d.). *EVALUASI KEBIJAKAN DAN MODEL PENINGKATAN KOMPETENSI GURU SD BERSERTIFIKAT BERBASIS TIK*.

Hendrawan, J., Nurfaika, S., Rahmadayanti, N., Ramadhani, Z., Setiyawan, R., & Sulaeman, N. F. (2023). PENGELOLAAN LABORATORIUM FISIKA SMA DI KOTA SAMARINDA PADA ERA DIGITAL. *JURNAL PEMBELAJARAN FISIKA*, *11*(4), 151. https://doi.org/10.19184/jpf.v11i4.36384

Indriani, F., & Satrianawati, S. (2018). EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI SD NEGERI TAMAN SARI KOTA YOGYAKARTA. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, *35*(2), 143–154. https://doi.org/10.15294/jpp.v35i2.15426

Kristina, P. C., Putri, S. A. R., & Nita, P. (2024). *Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Karakter Siswa*.

Nama, D. Y., & Tanggur, F. S. (2022). DISPARITAS MEDIA PEMBELAJARAN PADA ERA DIGITALISASI PENDIDIKAN DI WILAYAH PERBATASAN RI-RDTL (REFLEKSI PEMBELAJARAN ONLINE DAERAH PERBATASAN). *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi (JUKANTI)*, *5*(2), 295–305. https://doi.org/10.37792/jukanti.v5i2.797

Prastiwi, M. A., & Widodo, A. (2023). PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA MADRASAH DI ERA 5.0, PENDIDIKAN DAN TEKNOLOGI, PADA KOMPETENSI 21ST CENTURY. *PRIMER : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(5), 536–544. https://doi.org/10.55681/primer.v1i5.211

Putri, F. A., Bramasta, D., & Hawanti, S. (2020). *STUDI LITERATUR TENTANG PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA DALAM PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN THE POWER OF TWO DI SD*. *6*(2).

Rosa, E., Susanti, R., Safitri, E. R., & Gulo, F. (2024). KAJIAN PERBANDINGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT. *LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, *4*(4), 1044–1051. https://doi.org/10.51878/learning.v4i4.3480

Setyawan, D. M. (2018). Evaluasi Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Di SDN Magersari Kabupaten Rembang. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, *1*(3), 270–281. https://doi.org/10.15294/efficient.v1i3.27872

Sukmadinata, N. S. (2017). *Educational Policy Analysis in Indonesia*. Remaja Rosdakarya.

Sundoyo, H., & Sumaryanto, T. (2012). *EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN SISTEM GANDA BERDASARKAN STAKE COUNTENANCE MODEL*.

Suryana, S. (n.d.). *MODEL PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF) DALAM KAJIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN*.

Tia Basana Hutagalung & Liesna Andriany. (2024). Filosofi Pendidikan Yang diusung Oleh Ki Hadjar Dewantara dan Evolusi Pendidikan di Indonesia. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya*, *2*(3), 91–99. https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i3.615

Wardani, H. K., Sujarwo, S., Rakhmawati, Y., & Cahyandaru, P. (2023). Analysis of the Impact of the Merdeka Curriculum Policy on Stakeholders at Primary School. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, *11*(2), 513. https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.801

Vol 4 No 1 (2025) 21 – 30 E-ISSN 2962-231X
DOI: 10.56672/alwasathiyah.v4i1.472

Widiatmoko, C., Indriasari, R., Fajar Sidiq, F., & Kartini Mendrofa, D. E. (2024). PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER SEBAGAI WUJUD PENDIDIKAN BERKUALITAS DALAM UPAYA MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs). *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan*, *6*(2), 40–47. https://doi.org/10.55745/jwbp.v6i2.273

Windawati, A., & Setyowati, D. L. (2015). *EVALUASI PROGRAM SEKOLAH HIJAU (GREEN SCHOOL) DI SMA NEGERI 7 PURWOREJO SEBAGAI PERSIAPAN MENUJU RINTISAN SWALIBA (SEKOLAH BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN MITIGASI BENCANA)*.

World Bank. (2022). *World Development Report: Education*. The World Bank.

Yoshida, D. T., Sendjaya, S., Hirst, G., & Cooper, B. (2014). Does servant leadership foster creativity and innovation? A multi-level mediation study of identification and prototypicality. *Journal of Business Research*, *67*(7), 1395–1404. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.08.013

Zaman, R. K., Saleh, M. M., Hamid, S. A., Ibrahim, M., & Umar, A. (2024). *Pemerkasaan Konstruk Amalan Pendidikan Berimpak Tinggi Berteraskan Dasar Pendidikan Rabbani Kelantan*. *5*(2).